



DETERMINING FACTORS OF POVERTY IN INDONESIA: HOUSEHOLD ANALYSIS

Ayu Setyo Rini¹
Lilik Sugiharti*² 

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an overview of poverty in Indonesia by mapping the provinces based on economic growth and poverty rate as well as knowing the determinants of poverty in Indonesia with analysis at the household level. The analysis used secondary data from Susenas (National Socioeconomic Survey) in March 2012. Based on poverty mapping, the provinces are divided into four-quadrant and the analysis of 2007 and 2012 show quadrant position change of some provinces. There are provinces that getting better, those are Central Java and Maluku while North Sumatera, Banten, West Kalimantan, South Kalimantan, and South Sumatera show the worse condition. Analysis determinants of poverty measures probability of a household to be poor using logit regression model find that household characteristics like sex of household head, age of household head, number of household members, employment status of household head, access to credit, education of household head, access of information and communication technology, and locational (rural/urban) significantly affect the poor status of household in Indonesia.

Keywords: Poverty Mapping, Poor Status, Household Characteristics.

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
12 Oktober 2016
Tanggal Direvisi:
26 November 2016
Tanggal Diterima:
06 Desember 2016
Tersedia Online:
24 Desember 2016

*Korespondensi:
Lilik Sugiharti

E-mail:
lilik_sugiharti@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemiskinan di Indonesia dengan memetakan provinsi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta mengetahui determinan kemiskinan di Indonesia dengan analisis pada tingkat rumah tangga. Analisis menggunakan data sekunder dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2012. Berdasarkan pemetaan kemiskinan, provinsi dibagi menjadi empat kuadran dan analisis 2007 dan 2012 menunjukkan perubahan posisi kuadran beberapa provinsi. Ada provinsi yang membaik, yaitu Jawa Tengah dan Maluku, sedangkan Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Analisis determinan kemiskinan mengukur probabilitas suatu rumah tangga menjadi miskin dengan menggunakan model regresi logit menemukan bahwa karakteristik rumah tangga seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap kredit, pendidikan kepala rumah tangga, akses teknologi informasi dan komunikasi, dan lokasi (pedesaan/perkotaan) berpengaruh signifikan terhadap status rumah tangga miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Pemetaan Kemiskinan, Status Miskin, Karakteristik Rumah Tangga.

JEL: I32; R20.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami

pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya (Todaro & Smith, 2006, p.231; Kuncoro, 2003, p.101).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, namun masih terdapat sekitar 29,13 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2012. Kondisi kemiskinan juga dapat dilihat dari indeks kedalaman, indeks keparahan, dan rasio gini.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa indeks kedalaman, indeks kemiskinan, dan rasio gini menunjukkan penurunan di tiap tahun. Penurunan indeks kedalaman menunjukkan bahwa mereka yang miskin kondisinya semakin membaik dan mendekati garis kemiskinan. Indeks kedalaman di perdesaan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di desa yang keadaannya sangat kekurangan. Indeks keparahan kemiskinan di desa juga menunjukkan bahwa antar orang miskin di perdesaan, ketimpangan pengeluaran mereka cenderung tinggi, walaupun telah mengalami penurunan ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio gini menunjukkan kondisi ketimpangan agregat dan berdasarkan indeks ini dapat diketahui bahwa ternyata ketimpangan yang terjadi di perkotaan lebih tinggi bila dibandingkan dengan perdesaan. Secara umum, kondisi ketimpangan di Indonesia tergolong ketimpangan sedang.

Tabel 1: Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahhan (P2), dan Rasio Gini Berdasarkan Kota dan Desa Tahun 2010-2012

Tahun	P1			P2			Rasio Gini		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2010	1,57	2,80	2,21	0,40	0,75	0,58	0,38	0,32	0,38
2011	1,52	2,63	2,08	0,39	0,70	0,55	0,42	0,34	0,41
2012	1,40	2,36	1,88	0,36	0,59	0,47	0,42	0,33	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Menurut Remi & Tjiptoherijanto (2002, p.2), keberhasilan program pengentasan kemiskinan bergantung pada identifikasi kelompok dan wilayah yang ditargetkan seperti siapa yang miskin dan di mana mereka tinggal. Hal ini didukung oleh Todaro & Smith (2006, p.269) yang menyatakan bahwa “sebelum kita dapat merumuskan program dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memerangi kemiskinan, diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin itu, dan apa saja karakteristik ekonomi mereka”.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli untuk memahami karakteristik rumah tangga sebagai penentu status kemiskinan namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Usia kepala rumah tangga signifikan mempengaruhi kemiskinan (Ennin dkk., 2011; Sekhampu, 2013) namun, Mok dkk. (2007) menyatakan tidak signifikan. Sekhampu (2013) menemukan bahwa pendidikan kepala rumah tangga tidak signifikan mengurangi probabilitas untuk menjadi miskin namun, Geda dkk. (2001) dan Mok dkk. (2007) justru menemukan hubungan signifikan antara keduanya. Berbeda dengan Geda dkk. (2001) bahwa kepala rumah tangga laki-laki cenderung tidak miskin, Sekhampu (2013) menemukan gender kepala rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. sementara, jumlah anggota rumah tangga berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Ennin dkk., 2011; Sekhampu, 2013, Geda dkk., 2001; Chaudhry & Malik, 2009, Andersson dkk., 2006, Khalid dkk., 2005).

Selain karakteristik di atas, [Wirosardjono \(1992\)](#) menyatakan bahwa penduduk miskin umumnya memiliki keterbatasan dalam akses kredit dan informasi. [Pitt & Khandker \(1998\)](#) menemukan bahwa kredit mikro mampu meningkatkan pengeluaran konsumsi, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan aset *non-land*. Hal lain dikemukakan oleh Morduch dalam [Qubria \(2012\)](#) yang menemukan bahwa kredit mikro tidak memberikan efek atau hanya berefek kecil terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis kondisi kemiskinan di Indonesia dengan melihat terlebih dahulu pemetaan kemiskinan dan membandingkannya untuk periode tahun 2007 dan 2012. Kemudian, menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi probabilitas miskin seperti, gender kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap kredit usaha, pendidikan kepala rumah tangga, akses teknologi informasi dan komunikasi, dan lokasi tempat tinggal.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak ([Arsyad, 2010, p.7](#)). Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat bila terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi selalu dinyatakan dalam persentase yang merupakan perhitungan dari perubahan pendapatan nasional pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti dirumuskan sebagai berikut ([Sukirno, 2006, p.09](#)):

$$\Delta Y = \Delta PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \quad (1)$$

di mana:

- $PDRB_t$: PDRB tahun ke-t
 $PDRB_{t-1}$: PDRB tahun sebelumnya (t-1)

Menurut [Jhingan \(2012, p.67\)](#) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi terkait dengan sumber alamnya, sumber daya manusia, usaha, teknologi dan sebagainya. Sementara faktor non ekonomi dapat meliputi lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral.

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan di beberapa negara menunjukkan perbedaan. Laju pertumbuhan yang tinggi tidak akan selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di lain pihak, laju pertumbuhan yang rendah tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan ([Todaro & Smith, 2006, pp.259-260](#)). Pengukuran distribusi pendapatan yang paling sering digunakan adalah dengan membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan dan mengurutkannya dimulai dari kelompok dengan pendapatan terendah ([Van den Berg, 2005, p.490](#)).

Definisi dan Konsep Kemiskinan

Secara garis besar, kemiskinan dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial,

sumber-sumber keuangan dan informasi (Arsyad, 2010, p.299). Menurut Nugroho & Dahuri (2012), kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Secara konsep, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi (Nugroho & Dahuri, 2012, p.184). Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup (Van den Berg, 2005, p.509).

Penyebab Kemiskinan

Menurut Arsyad (2010, p.300), kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Sementara menurut Sen dalam Todaro & Smith (2006, p.23), kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut.

Menurut Dowling & Valenzuela (2010, pp.252-253), masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan membangun. Mereka juga memiliki modal fisik dalam jumlah yang sangat kecil. Lebih lanjut, jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mungkin mereka tidak memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi.

Kemiskinan di Tingkat Rumah Tangga

Kemiskinan dapat dilihat secara makro maupun mikro. Dalam hal makro, kemiskinan dilihat secara agregat dan luas sementara, pendekatan mikro diperlukan untuk mengetahui pasti kondisi kemiskinan, seperti siapa yang miskin dan bagaimana karakteristik mereka. Pendekatan pada level rumah tangga merupakan contoh pendekatan mikro. Menurut Anderson dkk. (2006), rumah tangga sebagai unit analisis layak dilakukan di negara sedang berkembang.

Menurut Khandker & Haughton (2009, p.157) penyebab-penyebab utama, atau paling tidak berhubungan dengan kemiskinan mencakup tiga karakteristik yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintah, serta hak milik dan pelaksanaannya. Sementara karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar, dan hubungan sosial. Lebih lanjut, karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari aspek demografi (seperti, jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga), aspek ekonomi (seperti, status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki), serta aspek sosial (seperti, status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal).

Kerangka Konsep Penelitian

Pemetaan kemiskinan digunakan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui kondisi ekonomi dan kemiskinan yang terjadi pada setiap provinsi. Sementara, mengingat begitu kompleksnya masalah kemiskinan, faktor penyebabnya dapat dilihat dari berbagai aspek. Penentu kemiskinan dapat dilihat secara makro maupun mikro. Level rumah tangga digunakan karena lebih mudah diamati dan mampu memberikan gambaran mengenai pola kemiskinan pada unit mikro. Karakteristik yang diamati mencakup beberapa aspek, yaitu aspek demografi, ekonomi, sosial, akses teknologi informasi dan komunikasi, serta lokasional.

Indikator ukuran dan struktur rumah tangga dalam aspek demografi merupakan hal penting karena mampu menunjukkan korelasi yang tepat antara kemiskinan dan susunan rumah tangga (Khandker & Haughton, 2009, p.161). Untuk melihat pola kemiskinan dari aspek demografi digunakan variabel gender kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga. Sementara, Aspek ekonomi dalam penelitian ini menggunakan variabel status pekerjaan kepala rumah tangga dan akses terhadap kredit usaha untuk mengetahui pola kemiskinan tersebut. Variabel pendidikan digunakan untuk melihat pola kemiskinan dari aspek sosial. Kemudian, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari kepemilikan telepon seluler/HP dan untuk mengetahui pengaruh lokasi tempat tinggal digunakan variabel lokasional yang membandingkan daerah perdesaan dan perkotaan.

Dari uraian di atas, maka dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini adalah gender kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap kredit usaha, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan telepon seluler, dan lokasi tempat tinggal berpengaruh terhadap probabilitas miskin rumah tangga di Indonesia

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data *cross section*. Analisis pemetaan kemiskinan menggunakan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam situs resminya. Sementara, analisis regresi logit menggunakan data sampel yang diambil dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Susenas Kor Maret 2012 yang mencakup 71.138 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia

Teknik Analisis

Analisis Pemetaan Kemiskinan

Pemetaan Kemiskinan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia ke dalam 4 kuadran berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Batas yang digunakan untuk mengelompokkan adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan nasional. Sehingga diperoleh, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinannya di atas nasional, pertumbuhan ekonomi di atas nasional namun tingkat kemiskinan di bawah nasional, pertumbuhan ekonomi di bawah nasional namun tingkat kemiskinan di atas nasional, dan pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan di bawah rata-rata.

Analisis Regresi Logit

Mengingat variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif atau *binary*, maka salah satu model ekonometri yang dianggap sesuai untuk digunakan adalah model logit. Tujuan penggunaan model logit adalah untuk mencari kemungkinan (*probability*) rumah tangga untuk berstatus miskin dengan alat analisis yang dipakai untuk mengolah data yaitu, program STATA 12. Model logit yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

$$L_i = \ln(P_i/1 - P_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{gender} + \beta_2 \text{usia} + \beta_3 \text{JART} + \beta_4 \text{bekerja} + \beta_5 \text{kredit} + \beta_6 \text{ppdk} + \beta_7 \text{hp} + \beta_8 \text{lokasi} + \varepsilon \quad (2)$$

Di mana:

P_i	: probabilitas miskin
β_0	: intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$: parameter (koefisien) regresi
<i>gender</i>	: gender kepala rumah tangga. 1 jika perempuan; 0 jika laki-laki
<i>usia</i>	: usia kepala rumah tangga
<i>JART</i>	: jumlah anggota rumah tangga
<i>bekerja</i>	: status pekerjaan kepala rumah tangga. 1 jika bekerja; 0 jika lainnya
<i>kredit</i>	: akses terhadap kredit usaha. 1 jika mengakses kredit; 0 jika lainnya
<i>ppdk</i>	: pendidikan kepala rumah tangga. 1 jika berpendidikan rendah; 0 jika berpendidikan menengah ke atas
<i>hp</i>	: kepemilikan telepon seluler/HP. 1 jika memiliki; 0 jika lainnya
<i>lokasi</i>	: lokasi tempat tinggal rumah tangga. 1 jika di perdesaan; 0 jika lainnya
ε	: <i>error</i>

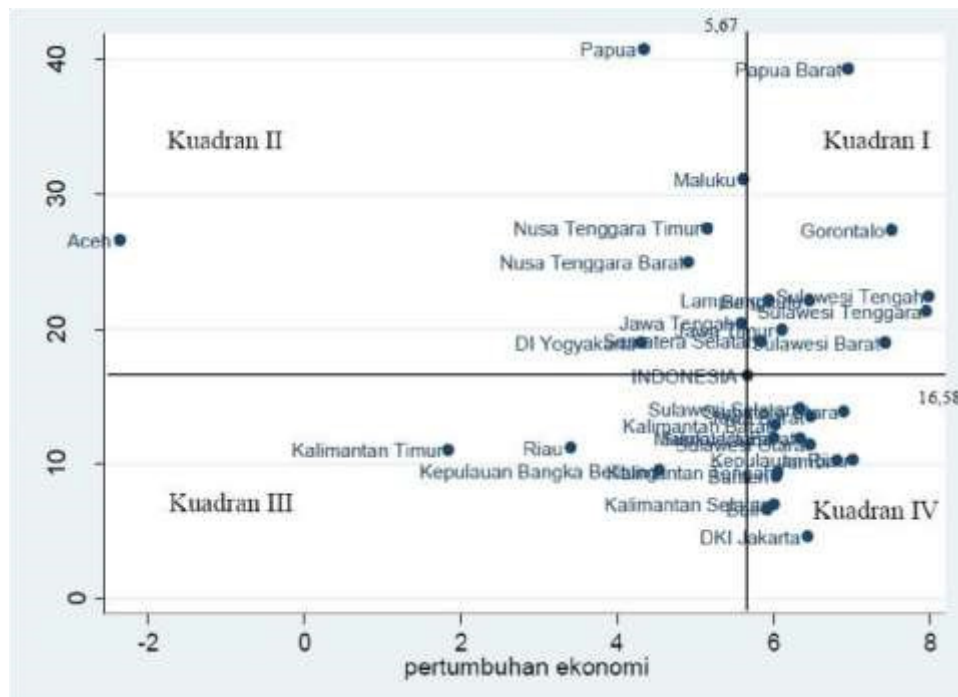
Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Kemiskinan

Berdasarkan pemetaan kemiskinan pada tahun 2007 dapat diketahui bahwa provinsi-provinsi yang termasuk dalam kuadran I adalah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sementara, pada pemetaan kemiskinan tahun 2012 provinsi-provinsi yang termasuk dalam kuadran I adalah provinsi Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Pada kuadran ini, dapat diketahui bahwa ternyata daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh tingkat kemiskinan yang rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah ini kurang memberikan kontribusi terhadap kelompok-kelompok miskin di daerah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah tersebut cukup tinggi.

Provinsi-provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata dan tingkat kemiskinan di atas rata-rata masuk dalam kuadran II. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan

Papua merupakan provinsi-provinsi yang termasuk dalam kuadran II pada tahun 2007. Sementara, provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi-provinsi yang termasuk dalam kuadran II pada tahun 2012. Kondisi perekonomian di daerah-daerah dalam kuadran II ini masih sangat kurang dan tentu saja tidak dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Daerah-daerah pada kuadran II ini merupakan daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius pemerintah dalam pembangunannya. Diperlukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah-daerah yang masuk dalam kuadran ini.



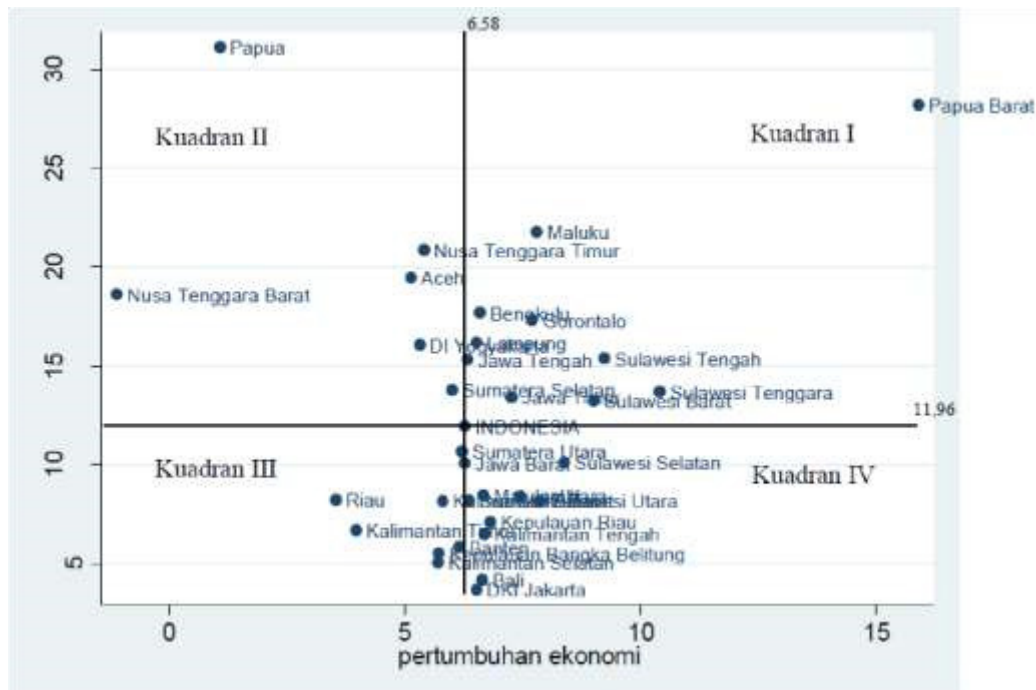
Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Gambar 1: Pemetaan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007

Kuadran III menunjukkan daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Provinsi yang termasuk dalam kuadran ini pada tahun 2007 adalah Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur. Sementara, pada tahun 2012 ketiga provinsi masih tetap berada di kuadran ini bersama provinsi-provinsi lain seperti, Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah yang masuk ke dalam kuadran ini sudah dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga berada di bawah rata-rata nasional, namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam perekonomiannya agar nantinya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Kuadran yang menunjukkan daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional sementara tingkat kemiskinannya di bawah rata-rata nasional adalah kuadran IV. Kuadran ini merupakan wilayah paling baik di antara kuadran lainnya. Daerah-daerah yang masuk dalam kuadran ini merupakan daerah ideal yang menjadi tujuan pembangunan setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini dapat disebabkan adanya pemerataan distribusi pendapatan baik pada daerah-daerah tersebut.

Terdapat Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara dalam kuadran ini pada tahun 2007. Pada tahun 2012, Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada kuadran ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Gambar 2: Pemetaan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012

Berdasarkan pemetaan kemiskinan tahun 2007 dan 2012 dapat diketahui bahwa terdapat provinsi-provinsi yang mengalami perubahan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinannya. Hal ini dapat dilihat oleh perubahan posisi kuadran dari provinsi-provinsi tersebut. Terdapat provinsi-provinsi yang kondisinya lebih baik (*getting better*) dan adapula yang kondisinya lebih buruk (*getting worse*) dalam rentang waktu lima tahun tersebut.

Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan adalah provinsi-provinsi yang meninggalkan posisi kuadran ideal yaitu kuadran IV dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata menuju kuadran III yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi mereka menurun menjadi di bawah rata-rata. Dibandingkan tahun 2007, keempat provinsi tersebut memang menunjukkan kondisi ekonomi yang memburuk pada tahun 2012. Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi, sementara Provinsi Banten mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Namun demikian, provinsi-provinsi tersebut masih mampu menjaga tingkat kemiskinan mereka di bawah rata-rata nasional.

Provinsi lain yang menunjukkan kondisi lebih buruk adalah provinsi Sumatera Selatan. Jika pada tahun 2007, Provinsi Sumatera Selatan berada pada kuadran I maka pada tahun 2012 posisinya berubah menjadi kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonominya memburuk menjadi di bawah rata-rata nasional. Lain halnya dengan Provin-

si Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah dan Maluku justru mengalami kondisi yang lebih baik dengan pergesernya posisi mereka dari kuadran II menjadi kuadran I pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut mengalami perbaikan dibidang ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mereka berada di atas rata-rata nasional meskipun, kondisi kemiskinan kedua provinsi masih tinggi.

Kuznets (1955) menyatakan bahwa pada awal pembangunan pendapatan akan terus tumbuh. Kenaikan pendapatan perkapita sering terpusat hanya pada beberapa sektor atau wilayah di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi pada awalnya membuat distribusi pendapatan menjadi lebih buruk namun kemudian membaik sebagai akibat semakin meningkatnya kesejahteraan antar sektor dan wilayah (Van den Berg, 2005, p.494). Jika distribusi pendapatan secara dramatis kurang sama dengan pertumbuhan, kemiskinan tidak mungkin turun (Roemer & Gugerty, 1997).

Jonaidi (2012) dalam penelitiannya menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melalui dua arah. Dia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan kemiskinan dan begitu pula sebaliknya, semakin menurun kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Namun, pada beberapa negara berkembang, pertumbuhan ekonomi tinggi yang mereka rasakan dapat kurang memberikan manfaat kepada kaum miskin (Todaro & Smith, 2006, p.231). Roemer & Gugerty (1997) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tanpa penurunan kemiskinan, maka distribusi pendapatan harus lebih setara.

Hasil Regresi Logit

Hasil dari regresi logit yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan suatu rumah tangga berstatus miskin ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2: Hasil Estimasi Model Regresi Logit

Variabel	Koefisien	SE	Z-stat	Z(prop)	Odds Ratio
Gender	0.2594	0.0441	5.89	0,000*	1.2961
usia	-0.0073	0.0011	-6.62	0,000*	0.9927
JART	0.4725	0.0073	65.02	0,000*	1.6039
bekerja	-0.1957	0.0507	-3.86	0,000*	0.8222
kredit	-0.4715	0.0515	-9.15	0,000*	0.6241
pddk	0.3156	0.0303	10.40	0,000*	1.3710
hp	-1.6474	0.0301	-54.80	0,000*	0.1925
lokasi	0.4301	0.0312	13.79	0,000*	1.5374
constant	-3.0920	0.0922	-33.55	0,000*	0.0454
Jumlah observasi			71138		
Likelihood Ratio			7613.22		
LR(prob)			0,0000*		
Pseudo R2			0.1637		

*signifikan 1 persen, **signifikan 5 persen; ***signifikan 10 persen
Sumber: Susenas, Maret 2012

Berdasarkan Tabel 2, maka persamaan model logistiknya adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = -3.0920 + 0.2594 \text{ gender} - 0.0073 \text{ usia} + 0.4725 \text{ JART} - 0.1957 \text{ bekerja} - 0.4715 \text{ kredit} + 0.3156 \text{ pddk} - 1.6474 \text{ hp} + 0.4301 \text{ lokasi}.$$

Uji Signifikansi Model

Uji Secara Bersama-Sama

Uji secara bersama-sama dilakukan dengan melihat nilai probabilitas *Likelihood Ratio*. Nilai probabilitas LR dalam model tersebut yaitu 0,0000 dan dengan *critical value* 1 persen, maka nilai tersebut berada pada area H_0 ditolak. Artinya, ke semua variabel bebas dalam model secara bersama-sama signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikatnya.

Uji Parsial (masing-masing)

Variabel yang signifikan secara statistik dalam mempengaruhi probabilitas untuk berstatus miskin secara parsial adalah variabel gender, usia, JART, bekerja, kredit, pddk, telepon seluler, dan lokasi. Variabel bebas yang signifikan secara statistik ditandai oleh tanda bintang.

Nilai probabilitas variabel gender, usia, JART, bekerja, kredit, pddk, telepon seluler, dan lokasi adalah 0,000 dan dengan *critical value* 1 persen, nilai tersebut berada pada area H_0 ditolak. Artinya, parameter dari variabel-variabel tersebut dapat dijadikan estimator dan variabel-variabel tersebut signifikan mempengaruhi kemungkinan untuk berstatus miskin secara parsial.

Uji Goodness of Fit

Uji Goodness of Fit dilihat dari nilai *pseudo R²*. Hasil regresi menunjukkan nilai *pseudo R²* yang rendah yaitu kurang dari 20 persen. Hal ini berarti variabel-variabel bebas dalam masing-masing model hanya mampu menjelaskan variasi variabel terikat kurang dari 20 persen. Meskipun demikian, nilai *pseudo R²* bukanlah hal yang utama dalam penentuan kualitas dari suatu model logit, sebaliknya arah dan signifikansi koefisiennyalah yang lebih utama (Gujarati & Porter, 2003, p.606). Kemudian, McFadden (1979, p.307) juga menjelaskan mengenai nilai *R-square* pada regresi logit yang sudah dapat dinilai baik meskipun nilainya antara 0,20,4 seperti pernyataan berikut:

“While the R² index is a more familiar concept to planner who are experienced in ordinary regression analysis, it is not as well behaved a statistic as the rho-squared measure, for maximum likelihood estimation. Those unfamiliar with rho-squared should be forewarned that its values tend to be considerably lower than those of the R² index ... For example, values of 0.2 to 0.4 for rho-squared represent an excellent fit.”

Pembahasan

Pada model regresi logit, variabel gender memiliki arah positif. Hal ini berarti bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berstatus miskin daripada yang dikepalai oleh laki-laki. Besar kemungkinan untuk berstatus miskin tersebut adalah 1,296 kali lebih besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Todaro & Smith (2006, p.270) bahwa sebab-sebab pokok kemiskinan yang memprihatinkan adalah banyaknya wanita yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol mereka terhadap penghasilan suami. Lebih lanjut, Todaro juga mengatakan bahwa akses kaum wanita terbatas untuk menikmati pendidikan dan pekerjaan layak di sektor formal. Dowling & Valenzuela (2010) juga menyatakan bahwa lebih dari tujuh puluh persen orang miskin di dunia adalah wanita terutama rumah tangga yang dikepalai oleh wanita.

Variabel usia memiliki arah negatif yang berarti bahwa seiring dengan meningkatnya usia kepala rumah tangga, kemungkinan rumah tangga tersebut untuk berstatus miskin menurun. Peningkatan satu satuan pada usia kepala rumah tangga akan menurunkan kemungkinan keluarga berstatus miskin sebesar 0,993 kali. Hal ini sesuai dengan temuan [Khalid dkk. \(2005\)](#) dan [Sekhampu \(2013\)](#) tetapi, bertentangan dengan penemuan Baulch dan McCulloch (1998) yang menemukan bahwa usia kepala rumah tangga tidak signifikan dalam mempengaruhi status miskin. [Bogale dkk. \(2005\)](#) menemukan bahwa kemungkinan keluarga untuk menjadi miskin menurun seiring dengan bertambahnya usia kepala rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh akumulasi kepemilikan aset yang terus meningkat, selain itu semakin tumbuhnya anak-anak menjadi dewasa juga dapat menjadi sumber tambahan bagi pendapatan keluarga.

Variabel JART memiliki arah positif yang berarti meningkatnya jumlah anggota rumah tangga meningkatkan kemungkinan suatu rumah tangga untuk berstatus miskin. Peningkatan satu satuan dalam jumlah anggota rumah akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga berstatus miskin sebesar 1,604 kali. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [Khalid dkk. \(2005\)](#), dan [Ennin, dkk \(2011\)](#) yang menemukan bahwa semakin banyak anggota suatu keluarga maka semakin besar kemungkinan mereka untuk jatuh miskin. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah anggota rumah tangga, maka pendapatan/pengeluaran per kapita yang didistribusikan di antara anggota rumah tangga akan semakin kecil.

Variabel bekerja menunjukkan arah negatif. Hal ini berarti bahwa rumah tangga dengan seorang kepala rumah tangga bekerja memiliki kemungkinan berstatus miskin lebih rendah daripada kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Berdasarkan hasil regresi, dapat diketahui bahwa kemungkinan tersebut adalah 0,822 kali lebih rendah. Temuan ini sesuai dengan penelitian [Sekhampu \(2013\)](#) yang juga menemukan adanya hubungan negatif antara status pekerjaan dan kemiskinan.

Variabel kredit menunjukkan arah negatif yang berarti bahwa rumah tangga yang mengakses kredit usaha memiliki kemungkinan berstatus miskin lebih rendah daripada yang tidak mengakses yaitu 0,624 kali lebih rendah. Hal serupa juga dikemukakan oleh [Khalid dkk. \(2005\)](#) yang menemukan bahwa keterbatasan akses terhadap kredit merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Kemudahan akses terhadap kredit dapat membantu keluarga miskin untuk memulai beberapa aktivitas yang menghasilkan pendapatan, seperti membuka toko, membuat kerajinan-kerajinan tangan, menjahit, dan lain-lain. Dengan demikian, keluarga tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraannya dan membantunya keluarga dari kemiskinan.

Berbeda dengan variabel kredit, variabel pddk justru menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan rendah memiliki kemungkinan 1,371 kali lebih tinggi daripada yang berpendidikan menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga sangat menentukan status miskin keluarganya. Sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam keluarga, kepala rumah tangga mampu menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan. Pendidikan kepala rumah tangga akan mempengaruhi pola pikir dalam pengambilan keputusan tersebut. [Khalid dkk. \(2005\)](#) menyatakan bahwa pendidikan dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kesempatan memperoleh kerja yang lebih baik. Sehingga, kondisi pendidikan kepala rumah tangga sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjukkan oleh variabel hp menunjukkan arah negatif. Hal ini berarti bahwa akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menurunkan kemungkinan rumah tangga untuk berstatus miskin. Berdasarkan hasil

regresi, rumah tangga yang memiliki hp memiliki kemungkinan berstatus miskin 0,193 kali lebih rendah daripada yang tidak memiliki. Seiring meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi menjadi sangat penting. Sesuai dengan temuan [Rahayu & Fillaili \(2007\)](#) bahwa fasilitas komunikasi membuat penyebaran informasi seperti usaha, lowongan pekerjaan, informasi pendidikan dan sebagainya menjadi lebih mudah.

Variabel lokasi yang menunjukkan lokasi tempat tinggal suatu rumah tangga, perdesaan atau perkotaan, juga mempengaruhi kemungkinan status miskin. Dari hasil regresi, variabel lokasi menunjukkan arah positif. Hal ini berarti bahwa rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah perdesaan memiliki kemungkinan berstatus miskin 1,537 kali lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini sesuai pernyataan [Todaro & Smith \(2006, p.269\)](#) bahwa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional.

Berdasarkan hasil regresi logit, dapat diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangga, gender kepala rumah tangga, lokasi tempat tinggal, dan pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor-faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi status miskin suatu rumah tangga. Faktor-faktor tersebut berpengaruh positif terhadap status miskin suatu rumah tangga.

[Jhingan \(2012\)](#) menjelaskan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan perkapita. Pertumbuhan penduduk memperlambat pendapatan perkapita dalam tiga cara, yaitu memperberat beban penduduk pada lahan, menaikkan biaya barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka, dan memerosotkan akumulasi modal, karena dengan bertambahnya anggota keluarga maka biaya akan meningkat. Dengan demikian, dampak pertumbuhan penduduk adalah menurunnya pendapatan perkapita. Secara umum, penduduk yang meningkat secara cepat akan memperlambat seluruh usaha pembangunan di negara terbelakang kecuali kalau dibarengi dengan laju pembentukan modal dan kemajuan teknologi yang tinggi ([Jhingan, 2012, p.409](#)).

Kaitan antara kemiskinan dengan gender juga menjadi isu pembangunan. [Todaro & Smith \(2006\)](#) menjelaskan bahwa selama status ekonomi kaum wanita relatif lebih rendah maka standar hidup mereka dan anak-anaknya juga akan tetap rendah. Lebih lanjut, rendahnya status ekonomi kaum wanita tersebut dapat memperlambat laju ekonomi nasional karena kondisi kesejahteraan dan tingkat pendidikan anak-anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesejahteraan ibu. Sehingga investasi sumber daya manusia hanya akan berhasil diteruskan ke generasi mendatang jika menyertakan upaya-upaya perbaikan status dan kesejahteraan kaum wanita ke dalam proses pembangunan ([Todaro & Smith, 2006, pp.273-274](#)).

Hubungan antara kemiskinan dan lokasi tempat tinggal, seperti dijelaskan oleh [Weber & Jansen \(2004\)](#), dapat melalui tiga cara. Pertama, tempat atau lingkungan merupakan sumber informasi, jaringan, dan norma yang menentukan aspirasi dan oportunitas untuk bekerja dan menjadi makmur. Kedua, pandangan strukturalis yang melihat suatu "tempat" sebagai kumpulan kesempatan dan hambatan di mana area perdesaan umumnya menawarkan sedikit kesempatan dan hambatan yang lebih besar untuk kemajuan ekonomi. Ketiga, model interaksi spasial di mana masyarakat dan perusahaan mengambil keputusan. Beberapa lingkungan menyediakan kemudahan akses terhadap pekerjaan dan informasi pekerjaan karena tingginya kepadatan kerja atau transportasi yang baik sementara tempat lain tidak menyediakannya.

Sama halnya dengan pernyataan di atas, [Blank \(2005\)](#) menjelaskan bahwa permasalahan di kota relatif lebih sedikit terkait dengan lingkungan alam, iklim, sumber daya alam, dan isolasi. Sehingga mereka yang tinggal di kota mampu mengakses berbagai sumber daya yang diinginkan. Sebaliknya, perdesaan memiliki keterbatasan keunggulan geografis (*geographic advantage*) yang menyebabkan kota lebih mampu memperbaiki kesejahteraan dibandingkan desa.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan. Ledakan penduduk tersebut menyebabkan meningkatnya kriminalitas, kemacetan, pengangguran, sulitnya penyediaan perumahan yang layak dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Sehingga, semakin lama kota tidak lagi mampu memberikan kesempatan yang memadai dan justru menimbulkan banyak hambatan. Namun demikian, masalah ini masih dapat di atas melalui peningkatan sumber daya manusia memadai. Dengan sumber daya manusia yang baik maka seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui banyak cara, salah satunya adalah melalui peningkatan pendidikan. [Todaro & Smith \(2006, p.461\)](#) menjelaskan bahwa pendidikan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas terkait dengan sekolah, terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik, dan tersedianya berbagai program pelatihan dan pendidikan. Lebih lanjut [Thirlwall \(2007\)](#) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah menyebabkan negara-negara sulit membangun industri baru dan menyerap teknologi baru.

Rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang memainkan peran penting dalam setiap pengambilan keputusan, maka tingkat pendidikan kepala rumah tangga akan berpengaruh terhadap pola pikir dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pendidikan orang tua juga terbukti memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pendidikan anak. [Dreze & Kingdon \(2001\)](#) menemukan bahwa anak-anak dari orang tua berpendidikan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bersekolah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh [Glick & Sahn \(2000\)](#) bahwa pendidikan orang tua memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi sekolah anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam memutuskan rantai kemiskinan melalui perbaikan pendidikan anak. Selain itu, pentingnya pendidikan dalam perbaikan kesejahteraan hidup dapat terlihat dari adanya korelasi positif antara pendidikan dengan penghasilan ([Todaro & Smith, 2006, p.464](#)).

Keimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah melalui proses analisis dan pembahasan, kemudian dapat disimpulkan simpulan dari penelitian ini, yakni berdasarkan analisis pemetaan kemiskinan tahun 2012 didapatkan Provinsi Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat pada kuadran I. Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, NTB, dan NTT pada kuadran II. Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten,

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur pada kuadran III. Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara pada kuadran IV. Bila dibandingkan tahun 2007, maka terdapat provinsi-provinsi yang kondisi lebih baik dan ada pula yang lebih buruk.

Provinsi yang kondisinya lebih baik adalah Provinsi Jawa Tengah dan Maluku sementara yang kondisinya memburuk adalah Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis regresi logit, secara parsial atau setiap variabel dalam model menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi status miskin rumah tangga. Variabel gender terbukti signifikan dan kepala rumah tangga perempuan memiliki kemungkinan 1,2761 kali lebih besar untuk miskin dibanding laki-laki. Variabel usia terbukti signifikan dan meningkatnya satu satuan usia dari kepala rumah tangga menurunkan kemungkinan untuk miskin sebesar 0,9934 kali. Variabel JART terbukti signifikan dan meningkatnya satu satuan dari jumlah anggota rumah tangga meningkatkan kemungkinan menjadi miskin sebesar 1,6308 kali. Variabel bekerja terbukti signifikan dan kepala rumah tangga yang bekerja memiliki kemungkinan miskin 0,8109 kali lebih rendah dibanding yang tidak bekerja. Variabel kredit terbukti signifikan dan rumah tangga yang mengakses kredit memiliki kemungkinan miskin 0,6339 kali lebih rendah daripada yang tidak mengakses. Variabel pddk terbukti signifikan dan kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah memiliki kemungkinan miskin 1,1182 kali lebih besar dari yang berpendidikan tinggi. Variabel hp terbukti signifikan dan rumah tangga yang memiliki tv kabel memiliki kemungkinan miskin 0,2131 kali lebih rendah dari yang tidak memiliki. Variabel komputer terbukti signifikan dan rumah tangga yang memiliki telepon seluler memiliki kemungkinan miskin 0,0811 kali lebih rendah dari yang tidak memiliki. Variabel lokasi terbukti signifikan dan rumah tangga yang bertempat tinggal di desa memiliki kemungkinan miskin 1,3148 kali lebih tinggi daripada yang bertempat tinggal di kota.

Berdasarkan analisis regresi logit ditemukan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen, yaitu gender, usia, JART, bekerja, kredit, pddk, telepon seluler, komputer, dan lokasi terbukti signifikan dalam menentukan kemungkinan status miskin rumah tangga.

Saran

Berdasarkan pada temuan hasil estimasi dan kondisi status kemiskinan, maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan modal manusia. Perbaikan dibidang pendidikan dan kesehatan akan membantu menciptakan sumber daya manusia yang baik yang berguna untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
2. Peningkatan program keluarga berencana
Meskipun telah berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, namun sosialisasi keluarga berencana harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengubah pola pikir beberapa masyarakat yang keliru, sehingga menyebabkan mereka cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak.
3. Peningkatan status dan pemberdayaan wanita
Menambah program-program peningkatan status dan pemberdayaan wanita khususnya mereka yang tergolong miskin dan yang menjadi kepala keluarga. Program tersebut dapat berbentuk perbaikan pendidikan, motivasi, pelatihan keterampilan dan kerja, dan sebagainya.
4. Peningkatan program pembangunan khususnya di desa
Masih tingginya konsentrasi penduduk miskin di desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga, untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pembangunan desa menjadi sangat penting. Perbaikan infrastruktur seperti, jalan, listrik,

dan fasilitas umum di daerah perdesaan dapat membantu mengurangi beban kemiskinan yang mereka tanggung.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan

Perbaikan kualitas dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pengajar dan proses belajar. Penyuluhan cara mengajar yang efektif sangat diperlukan dalam hal ini. Sementara peningkatan kuantitas dilakukan dengan menambah jumlah sekolah dan tenaga pengajar khususnya di daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pendidikan usia dewasa juga diperlukan untuk membantu perbaikan pengetahuan dan pola pikir.

Daftar Pustaka

- Andersson, M., Engvall, A., & Kokko, A. (2006). *Determinants of poverty in Lao PDR*. Sida.
- Arsyad, L. (2010). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama. BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Kemiskinan, (*online*, <http://www.bps.go.id/> diakses 10 April 2014).
- Blank, R. M. (2005). Poverty, policy, and place: How poverty and policies to alleviate poverty are shaped by local characteristics. *International Regional Science Review*, 28(4), 441-464.
- Bogale, A., Hagedorn, K., & Korf, B. (2005). Determinants of poverty in rural Ethiopia. *Quarterly journal of international agriculture*, 44(2), 101-120.
- Chaudhry, I. S., & Malik, S. (2009). The Impact of Socioeconomic and Demographic Variables on Poverty: A Village Study. *Lahore Journal of Economics*, 14(1).
- Dowling, M. J. & Valenzuela, R. M. (2010). *Economic Development in Asia*, 2nd Edition. Cengage Learning Asia.
- Drèze, J., & Kingdon, G. G. (2001). School participation in rural India. *Review of Development Economics*, 5(1), 1-24.
- Ennin, C. C., Nyarko, P. K., Agyeman, A., Mettle, F. O., & Nortey, E. N. N. (2011). Trend analysis of determinants of poverty in Ghana: Logit approach. *Research Journal of Mathematics and Statistics*, 3(1), 20-27.
- Geda, A., De Jong, N., Mwabu, G., & Kimenyi, M. (2001). Determinants of poverty in Kenya: A household level analysis. *ISS Working Paper Series/General Series*, 347, 1-20.
- Glick, P., & Sahn, D. E. (2000). Schooling of girls and boys in a West African country: the effects of parental education, income, and household structure. *Economics of education review*, 19(1), 63-87.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). *Basic econometrics*. Singapore: McGraw Hill Book Co.
- Jhingan, M.L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Alih Bahasa: D. Guritno). Rajawali Press.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 140–164.
- Khalid, U., Shahnaz, L., & Bibi, H. (2005). Determinants of poverty in Pakistan: A multinomial logit approach. *The Lahore Journal of Economics*, 10(1), 65-81.
- Khandker, S., & Haughton, J. (Eds.). (2009). *Handbook on poverty and inequality*. World Bank

Publications.

- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuznets, S. S. (1995). Toward a Theory of Economic. *Lekacman R. National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad*.
- McFadden, D. (1979), *Quantitative methods for analyzing travel behavior of individuals: Some recent developments*, in: D. Hensher and P. Stopher, eds., Behavioral travel modeling (Croom Helm, London), 279-318.
- Mok, T. Y., Gan, C., & Sanyal, A. (2007). The determinants of urban household poverty in Malaysia. *Journal of Social Sciences*, 3(4): 190-196.
- Nugroho, I., & Dahuri, I. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan* (second ed). LP3ES
- Pitt, M. M., & Khandker, S. R. (1998). The impact of group-based credit programs on poor households in Bangladesh: Does the gender of participants matter?. *Journal of political economy*, 106(5), 958-996.
- Quibria, M. G. (2012). *Microcredit and Poverty Alleviation: Can microcredit close the deal?* (No. 2012/78). WIDER Working Paper.
- Rahayu & Fillaili. (2007). *Pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Laporan SMERU. No.23, 5-10.
- Remi, S. S. & Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia: suatu analisis awal*. Rineka Cipta.
- Roemer, M., & Gugerty, M. K. (1997). *Does economic growth reduce poverty?*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Sekhampu, T. J. (2013). Determinants of poverty in a South African township. *Journal of Social Sciences*, 34(2), 145-153.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Penerbit Barta Gorad.
- Thirlwall, A. P. (2007). The least developed countries report, 2006: Developing productive capacities. *The Journal of Development Studies*, 43(4), 766-778.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan, Jilid 1 (Alih Bahasa: Haris Munandar dan Puji AL). Penerbit Erlangga.
- Weber, B. A., & Jensen, L. (2004). *Poverty and place: A critical review of rural poverty literature*.
- Wirosardjono, S. (1992). Pengentasan Kemiskinan dan Statistik. dalam buku Tika Noorjaya. *Strategi, Perencanaan dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan*. CFMS.
- Van den Berg, H. (2005). *International trade and economic growth*. McGraw-Hill.